

Faktor- Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Kelurahan Bulagi Satu Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan

Melisa S. Marjun¹, RukiahNggilu², Kurniadi K. Hasan³,
^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Melisa S., Marjun, e-mail: Melisamarjun27@gmail.com¹,
nggilurukiah23365@gmail.com², yadiehhz@gmail.com³

Published: July , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Bulagi Satu Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan 3 fokus penelitian yaitu Sumberdaya manusia, Partisipasi Masyarakat, dan Koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sumber data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia terdapat semangat dan dedikasi yang cukup tinggi dari beberapa kader, masih terdapat kekurangan dalam hal pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan program secara maksimal. Sebagian besar kader PKK belum mendapatkan pelatihan yang cukup, terutama dalam hal pengelolaan program, penyusunan laporan, dan dokumentasi kegiatan. Kurangnya partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan. Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat terutama generasi muda, menunjukkan ketertarikan yang rendah terhadap kegiatan PKK. Koordinasi menunjukkan bahwa koordinasi antara PKK dan pemerintah kelurahan secara umum berjalan cukup baik. Terdapat komunikasi yang aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Pemerintah kelurahan secara konsisten menunjukkan dukungan positif melalui penyediaan fasilitas tempat pertemuan, bantuan dana kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran, serta pelatihan atau pembinaan untuk kader PKK.

Keywords: Sumber Daya Manusia; Partisipasi Masyarakat; Koordinasi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan. PKK pertama kali lahir sebagai gerakan nasional yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebagai gerakan pembangunan yang berbasis masyarakat, PKK memiliki struktur yang tertata dari tingkat pusat hingga tingkat desa dan kelurahan, dengan peran utama sebagai fasilitator dalam menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, terutama perempuan (Indarwati, 2017).

Secara struktural, organisasi PKK memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. di setiap tingkatan ini, PKK memiliki Tim Penggerak PKK yang bertugas untuk merancang, mengelola, dan melaksanakan program-program pemberdayaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Struktur kepemimpinan PKK umumnya diketuai oleh istri kepala daerah atau kepala pemerintahan setempat, seperti istri gubernur di tingkat Provinsi, istri bupati di tingkat Kabupaten, serta istri lurah atau kepala desa di tingkat Desa/Kelurahan. Keberadaan struktur ini mencerminkan sinergi antara PKK dengan pemerintah dalam mendukung Pembangunan berbasis keluarga. Sebagai

organisasi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, PKK sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjalankan berbagai programnya. Kader PKK yang terdiri dari para relawan disetiap tingkatan memiliki peran penting dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan program PKK ditingkat akar rumput. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat akibat kurangnya pemahaman, minimnya dukungan finansial, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, pendampingan, serta alokasi anggaran menjadi sangat penting agar program-program PKK dapat berjalan dengan optimal (Salam et al., 2024).

Sumber Daya Manusia

Menurut Hamali (dalam Panduwirananta et al., 2019) menyatakan bahwa sumberdaya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumberdaya.

Menurut (Leuwol et al., 2020) SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM merupakan investasi sangat berharga bagi sebuah organisasi yang perlu dijaga. Setiap organisasi harus mempersiapkan program yang berisi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang sesuai dengan lingkungan organisasi. Untuk mencapai produktivitas yang maksimum, organisasi harus menjamin dipilihnya tenaga kerja yang tepat dengan pekerjaan serta kondisi yang memungkinkan mereka bekerja optimal.

Menurut (Susan, 2019) Sumberdaya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan.

Menurut (Soemarsono, 2018) Sumber Daya Manusia (SDM) akan sangat mempengaruhi organisasi, akan dibawa kemana organisasi itu tergantung Sumber Daya Manusia yang tersedia dan dimiliki, apakah akan menjadikan organisasi yang baik sudah pasti harus ada Sumber Daya Manusia yang baik pula demikian sebaliknya apabila ketersediaan sumberdaya manusia kurang mencukupi atau bisa disebut buruk sudah pastilah akan mendapatkan keburukan pula terhadap organisasi. Keberhasilan dan Kegagalan organisasi tergantung keberhasilan dalam mengelola sumber daya manusianya jadi betapa pentingnya Sumber Daya Manusia itu kepada organisasi.

Menurut (Hasan et al., 2024) Pemberdayaan adalah untuk meningkatkan SDM dan kesejahteraan desa melalui optimalisasi dan kreasi penggunaan potensi lokal, mendukung segala proses dan pembangunan yang ada di masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan rasa kebersamaan dan jiwa kepemimpinan mahasiswa yang peduli terhadap masyarakat, mendekatkan perguruan tinggi dan masyarakat, dan membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Isbandi (dalam Bura et al., 2024) mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pemberian informasi, perumusan masalah, penyusunan rencana, pengambilan keputusan bagi pelaksanaan dan pemanfaatan hingga evaluasi pada suatu kegiatan.

Menurut Adisasmita (dalam Rismayanti et al., 2020) Partisipasi merupakan peran serta masyarakat dalam pembangunan suatu kawasan pedesaan, dimana bersedia ikut serta dalam pembangunan suatu proyek. Dengan pelibatan masyarakat secara aktif diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Menurut Hetifah Sj. Soemanto (dalam SURAT, 2020) partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan

organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut (Wahidin & Rukiah, 2022) Partisipasi masyarakat sesuai penelitian dapat dilakukan melalui beberapa model pendekatan. Pertama, Keikutsertaan masyarakat di desa terutama program pelestarian hutan lindung Pengamatan dapat dilihat dari antusias masyarakat hadir dalam diskusi baik berupa penyuluhan maupun keinginan masyarakat dalam membentuk kelompok menanam pohon, setiap kelompok membagi tugas ada yang menanam ada juga yang membersihkan saluran air. Kedua, Keinginan masyarakat dalam pelaksanaan program pelestarian hutan lindung melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar serta pemberian motivasi bagi masyarakat seperti program beasiswa pendidikan bagimasyarakat dan pelatihan bagi tenaga Pendidik mengenai lingkungan hidup. Ketiga, tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian hutan lindung diantaranya tidak boleh menebang pohon, merusak ekosistem, melakukan perburuan satwa dan ilegal logging.

Koordinasi

Menurut Westra (dalam Tololiu et al., 2022) Secara etimologis, istilah koordinasi dalam bahasa inggris disebut “coordination”, menjelaskan bahwa istilah coordination terdiridari dua kata yaitu “co” yang artinya “bersama” dan “ordination” yang berarti “memerintah”; jadi coordination berarti memerintah bersama. Coordination berasal dari bahasa latin yaitu “cum” yang berarti berbeda-beda, dan “ordinare” yang artinya menyusun atau menempatkan sesuatu pada keharusannya.

Menurut (Padagi, 2016) Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu atau berkesinambungan, tidak hanya terhenti pada saat tahap awal perencanaan saja dan merupakan proses yang berkelanjutan.

Menurut (Firmansyah et al., 2022) Koordinasi sendiri merupakan suatu pergerakan usaha yang teratur untuk menciptakan jumlah, waktu, serta arah pelaksanaan yang tepat agar menghasilkan tindakan terpadu serta harmoni yang menuju kearah sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut PP No. 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah Pasal 1 ayat (1) Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una. Lokasi penelitian memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data keperluan penelitian, Jenis Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian menurut (Sugiono, 2019) penelitian kualitatif dianggap lebih seusi untuk studi uang berfokus pada pemahaman social dari sudut pandang para partisipan, dalam hal ini penenlitian akan menyajikan hasil studi berdasarkan laporan, pandangan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian dijelaskan secara mendetail dalam laporan penelitian (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., 2019), Yang menjadi fokus dari penelitian ini yakni, Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, Koordinasi, Sumber data ialah data primer data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau pun informasi yang digunakan untuk peneltian. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari catatan-catatan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PKK. Menurut (Sitoyo & Sodik, 2015) dalam buku metode penelitian, menjelaskan bahwa aktivitas penelitian tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian, data adalah empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Observasi, Wawancara dan

Dokumentasi. Menurut (Sitoyo & Sodik, 2015) dalam bukunya berjudul dasar metodologi penelitian, menyatakan bahwa dalam menggunakan Teknik observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi, menurut (Mamik, 2015) wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai, menurut (Sitoyo & Sodik, 2015) metode dokumentai yaitu mencari data atau hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya. Metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah.

State Of The Art

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahma et al., 2024) dengan judul efektifitas program usaha peningkatan pendapatan keluarga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (UP2K-PKK) di kecamatan Sungai pandan kabupaten hulu Sungai utara. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada kaum perempuan dengan keluarga yang kurang mampu tapi membutuhkan modal untuk membuka usaha. Fenomena masalah yaitu kurangnya pelatihan, pembinaan dan pendampingan dari pihak pengelola, kurangnya pengetahuan dari segi pemasaran dan keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi, kurangnya perhatian dari pemerintah desa serta adanya batasan nominal dalam peminjaman. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas program usaha peningkatan pendapatan keluarga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (UP2K-PKK) di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus di Desa Pandulangan dan Desa Teluk Betung) serta untuk mengetahui faktor-faktor dari program tersebut. Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu purposive sampling dengan informan berjumlah 18 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas yaitu dengan triangulasi dan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Sungai Pandan belum efektif, dengan aspek keberhasilan program indikator kemampuan operasional belum efektif dan mekanisme sudah efektif, aspek keberhasilan sasaran indikator ketepatan sasaran Desa Pandulangan cukup efektif dan Desa Teluk Betung belum efektif dan pencapaian tujuan belum efektif, aspek kepuasan terhadap program indikator kebutuhan masyarakat cukup efektif dan tingkat kepuasan cukup puas, aspek tingkat input dan output indikator input belum efektif dan dampak cukup efektif dan aspek pencapaian tujuan menyeluruh indikator penilaian masyarakat cukup positif dan tanggung jawab Desa Pandulangan sudah baik dan Desa Teluk Betung belum efektif. Faktor penghambat terdiri dari kompetensi dan pembinaan, sedangkan faktor pendorong meliputi, partisipasi atau dukungan masyarakat dan tujuan yang jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Salam et al., 2024) dengan judul “peran pemerintah dalam pemberdayaan Masyarakat melalui program PKK kemajet di kecamatan kedungdung kabupaten sampan”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan Masyarakat melalui program PKK kemajet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu peran pemerintah dalam pemberdayaan Masyarakat melalui program PKK kemajet adalah peran pemerintah kabupaten sampan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PKK kecamatan kedungdung kabupaten sampan telah berjalan dengan Baik, hasil tersebut belum mencapai nilai optimal yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rumayah, 2015) dengan judul pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam pemberdayaan

masyarakat di desa malinau kota kecamatan malinau. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam pemberdayaan masyarakat, metode penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu Pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Malinau Kota mencakup berbagai kegiatan. Salah satu yang telah terlaksana adalah program Bina Keluarga Balita (BKB) dengan membentuk kelompok seperti Regu Inti, Regu Piket, dan Regu Bantu. Kegiatan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Posyandu yang rutin dilakukan setiap bulan, di mana terdapat Alat Permainan Edukatif (APE) untuk pengenalan warna dan angka kepada anak-anak balita. Meskipun kegiatan BKB telah berjalan, pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum dapat terlaksana karena keterbatasan dana yang dimiliki PKK desa. Disisi lain, kegiatan PKK di bidang pengetahuan dan keterampilan belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, luasnya wilayah kerja, serta rendahnya kinerja dari anggota PKK. Padahal, program ini sangat penting dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan mereka, serta membantu dalam mengurangi kemiskinan yang masih ada. Ada pun program pengembangan kehidupan berkooperasi juga telah dijalankan melalui kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masyarakat masih kurang percaya terhadap pengelolaan koperasi oleh PKK. Selain itu, keterbatasan dana dan kurangnya semangat kerja dari para pengurus PKK turut menjadi penghambat keberhasilan program ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasam penelitian ini mengenai factor-faktor penghambat pelaksanaan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di kelurahan Bulangi kabupaten banggai kepulauan. Dengan focus penelitian ini adalah Sumberdaya manusia, Partisipasi Masyarakat dan Koordinasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran sentral dalam keberhasilan suatu program, termasuk dalam konteks pelaksanaan program PKK di Kelurahan Bulagi Satu. SDM dalam hal ini mencakup para kader PKK dan warga yang terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa meskipun terdapat semangat dan dedikasi yang cukup tinggi dari beberapa kader, masih terdapat kekurangan dalam hal pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan program secara maksimal. Sebagian besar kader PKK belum mendapatkan pelatihan yang cukup, terutama dalam hal pengelolaan program, penyusunan laporan, dan dokumentasi kegiatan. Hal ini menyebabkan mereka sering kali hanya mengikuti pola yang sudah ada sebelumnya tanpa memiliki kemampuan untuk berinovasi atau mengembangkan program secara mandiri. Masih banyak kegiatan yang dijalankan secara tradisional dan belum berbasis pada analisis kebutuhan masyarakat atau pendekatan yang terstruktur. Hal ini sejalan dengan pendapat (Robbins & Judge, 2017), yang menyatakan bahwa SDM yang berkualitas mencerminkan kompetensi, keterampilan, dan kemampuan dalam menjalankan tugas organisasi secara efektif. Sementara Menurut (Arma, 2016), efektivitas kader dalam PKK sangat bergantung pada tingkat pendidikan serta pelatihan yang mereka terima. Lemahnya kemampuan teknis para kader juga mengindikasikan belum adanya system pengembangan kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Di sisi lain, keterbatasan pengetahuan ini juga menjadi hambatan dalam pengambilan inisiatif lokal. Banyak program yang hanya berjalan secara administrative tanpa ada refleksi terhadap dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaksanaan program memerlukan pelatihan secara berkala, pendampingan dari instansi teknis, serta penguatan peran kader melalui kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah kelurahan. Selain itu, penting untuk membangun system insentif non-material

bagi kader seperti penghargaan moral atau publikasi atas kinerja untuk menjaga motivasi mereka.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat, terutama dari kalangan ibu rumah tangga, masih sangat terbatas. Banyak dari mereka yang masih terfokus pada tugas-tugas domestik dan belum melihat pentingnya keterlibatan dalam kegiatan social kemasyarakatan seperti program PKK. Tantangan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM tidak hanya pada kader PKK, tetapi juga dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya kontribusi aktif dalam pembangunan komunitas. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan berkala, pendampingan intensif, serta pembinaan langsung dari pemerintah kelurahan maupun instansi terkait. Selain itu, strategi yang bersifat kolaboratif antara kader PKK dan pihak kelurahan perlu lebih diperkuat agar pengembangan SDM dapat lebih terarah dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam keberhasilan pelaksanaan program PKK di tingkat kelurahan. Dalam konteks Kelurahan Bulagi Satu, partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat, terutama generasi muda, menunjukkan ketertarikan yang rendah terhadap kegiatan PKK. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa kegiatan PKK tidak relevan dengan kebutuhan atau minat mereka. Selain itu, keterbatasan waktu dan energy masyarakat akibat kesibukan dalam pekerjaan dan urusan rumah tangga juga menjadi alasan utama rendahnya partisipasi.

Banyak warga yang memprioritaskan pekerjaan produktif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga enggan melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai manfaat dan tujuan kegiatan PKK juga turut berkontribusi terhadap minimnya keterlibatan warga. Meskidemikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong peningkatan partisipasi, seperti menggunakan media sosial dan grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi, serta melibatkan tokoh masyarakat dan struktur RT/RW. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan partisipasi di beberapa kelompok masyarakat meskipun belum merata. Strategi komunikasi yang melibatkan masyarakat dalam seluruh proses kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terbukti dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab, sehingga partisipasi masyarakat dapat tumbuh lebih kuat. Untuk meningkatkan partisipasi secara berkelanjutan, program-program PKK perlu disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masyarakat, termasuk melibatkan generasi muda melalui pendekatan yang lebih modern dan inklusif. Meningkatkan kapasitas kader PKK dalam hal komunikasi publik, pendekatan persuasif, serta penggunaan teknologi informasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan keterlibatan warga.

Isbandi (dalam Bura et al., 2024) mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pemberian informasi, perumusan masalah, penyusunan rencana, pengambilan keputusan bagi pelaksanaan dan pemanfaatan hingga evaluasi pada suatu kegiatan. Partisipasi sejati mengandaikan adanya hubungan yang setara antara pemerintah dan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam konteks Kelurahan Bulagi Satu, partisipasi masih cenderung bersifat pasif dan simbolik karena belum menyentuh aspek pengambilan keputusan secara penuh. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan inovatif. Program PKK dapat diperluas dengan mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan, pelatihan keterampilan digital, dan pengembangan komunitas berbasis keluarga muda. Hal ini akan membantu membangun kesadaran lintas generasi dan memperluas basis partisipasi masyarakat.

Koordinasi

Koordinasi merupakan unsure penting dalam pelaksanaan program PKK karena melibatkan sinergi antara berbagai pihak, terutama antara PKK dan pemerintah kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara PKK dan pemerintah Kelurahan Bulagi secara umum berjalan cukup baik. Terdapat komunikasi yang aktif, baik dalam

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Pemerintah kelurahan secara konsisten menunjukkan dukungan positif melalui penyediaan fasilitas tempat pertemuan, bantuan dana kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran, serta pelatihan atau pembinaan untuk kader PKK. Meskipun demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk keterbatasan anggaran dan fasilitas yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Namun, berkat adanya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antara PKK dan pihak kelurahan, kendala tersebut dapat diatasi dengan solusi yang disepakati bersama. Koordinasi yang berjalan dengan baik memungkinkan pelaksanaan program lebih efektif dan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Bentuk koordinasi yang ideal menurut para informan adalah koordinasi yang terencana, terbuka, dan berkelanjutan. Artinya, komunikasi antara PKK dan pemerintah kelurahan tidak hanya dilakukan saat pelaksanaan kegiatan saja, tetapi juga dimulai sejak tahap perencanaan hingga laporan akhir. Menurut (Padagi, 2016) Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu atau berkesinambungan, tidak hanyaterhenti pada saat tahap awal perencanaan saja dan merupakan proses yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Firmansyah et al., 2022) yang menyatakan bahwa koordinasi yang efektif haruslah terencana, terbuka, dan berkelanjutan.

Dalam kasus di Kelurahan Bulagi Satu, koordinasi yang bersifat incidental tidak cukup untuk membangun sinergi yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih formal seperti forum koordinasi bulanan atau pertemuan rutin antara pihak kelurahan, kader PKK, dan stakeholder terkait. Penggunaan media digital, seperti grup komunikasi berbasis aplikasi pesan instan atau platform daring, juga dapat menjadi solusi dalam menjembatani komunikasi lintas waktu dan tempat, serta memastikan seluruh pihak tetap terinformasi dan terlibat. Dengan adanya forum ini, diharapkan proses perencanaan hingga evaluasi program dapat berjalan lebih terstruktur dan terkoordinasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program PKK di Kelurahan Bulagi Satu masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan pengetahuan dan keterampilan para kader. Hal ini menyebabkan kegiatan PKK berjalan secara tradisional dan kurang inovatif, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam hal kemampuan teknis dan inovasi program. Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri, yang disebabkan oleh anggapan bahwa program PKK kurang relevan, kesibukan warga, serta sosialisasi yang belum maksimal. Oleh karena itu, perlu strategi komunikasi yang lebih efektif, dengan melibatkan masyarakat sejak awal serta meningkatkan kapasitas kader dalam hal komunikasi interpersonal dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sementara itu, koordinasi antara tim PKK dan pemerintah Kelurahan Bulagi Satu sejauh ini sudah berjalan cukup baik, ditandai dengan komunikasi aktif dan dukungan fasilitas dari pihak kelurahan. Namun, keterbatasan anggaran dan sarana masih menjadi hambatan dalam menciptakan sinergi yang lebih kuat. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibentuk mekanisme koordinasi formal melalui pertemuan rutin dan pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi dan pelaporan program. Dengan adanya struktur koordinasi yang lebih terorganisir dan berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan program PKK dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan mampu menjawab tantangan yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arma, D. S. (2016). Evaluasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Program Pascasarjana*, 17.

- <http://repository.ut.ac.id/7322/1/42817.pdf>
- Bura, S. P., Benu, E. D. N. ., & Humau, F. B. R. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembangdes) (Studi Tentang Musrembangdes di Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun 2022). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(4), 276–288. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.538>
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. S. (2019). metode penelitian kualitatif. In *Cv. Syakir Media Press* (Vol. 11, Issue 1).
- Firmansyah, R., Mangngasing, N., & Sussanti, S. (2022). Koordinasi Pendidikan Masyarakat Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kana Mapande Kota Palu. *PARADIGMA: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 109–128. <https://doi.org/10.55100/paradigma.v1i2.49>
- Hasan, K. K., Bakari, L., Gobel, E., Pakaya, N. A., & Mirzan, M. (2024). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAMBOO MELALUI PENYULUHAN UMKM. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 864–867.
- Herry Krisnandi, S.E., M.M, Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M, Dr. Ir. Edi Sugiono, S.E., M. M. (2019). *PENGANTAR MANAJEMEN* (Cetakan 20). LPU-UNAS.
- Indarwati, R. (2017). *Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan*. 5(2), 861–872.
- Leuwol, N. V., Wula, P., Purba, B., Marzuki, I., Brata, D. P. N., Efendi, M. Y., Masrul, Sahri, Ahdiyati, M., Sari Novita Ifit, Gusti, S., Nugraha, N. A., Bungin, E. R., Purba, B., & Anwar, A. F. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan* (Janner Simarmata (ed.); Cetakan 1). Yayasan Kita Menulis.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif* (Pertama). Zifatama Publisher.
- Padagi, L. (2016). Koordinasi Pemerintahan Dalam Menunjang Kewenangan Otonomi Desa. *Jurnal Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN*, 3–5.
- Panduwirananta, R., Yulianti, F., & Syahrani. (2019). Pengaruh Peranan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Pt Multi Cargo Energy Banjarmasin. *Manajemen*, 61201.
- Rahma, Y., Setiawan, I., & Raudah, S. (2024). *EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (UP2K-PKK) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DI DESA PANDULANGAN DAN DESA TELUK BETUNG)*.
- Rismayanti, P. R., Masdarini, L., & Suriani, N. M. (2020). Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. *Jurnal BOSAPARIS: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 11(2), 57. <https://doi.org/10.23887/jjpkk.v11i2.27397>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior 17th Global Edition*. *Lego, Italy: Pearson*.
- Rumayah. (2015). PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MALINAU KOTA KECAMATAN MALINAU Rumayah1. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 3(2), 323–335.
- Salam, A., Kamariyah, S., & Pramudiana, I. D. (2024). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PKK Kemajet di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 1–12.
- Sitoyo, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. *Yogyakarta: Literasi Media Publishing*, 36–37.
- Soemarsono, S.Sos., M. (2018). SDM (Sumber Daya Manusia). Pilar Penting Atas Keberhasilan dan Kegagalan Organisasi. *KKPN Palang Karaya*. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/palangkaraya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2825-sdm-sumber-daya-manusia-pilar-penting-atas-keberhasilan-dan->

- kegagalan-organisasi.html
- SURAT, T. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN DANA DESA DI DESA TUABATU KECAMATAN TAMPANAMMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 6(91). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/29156>
- Susan, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 952–962.
- Tololiu, W. R., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2022). Koordinasi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(122), 48–55.
- Wahidin, L., & Rukiah, N. (2022). Wahidin Lukum, Ruqiah Ngilu. *Jurnal Teknologi Pertanian Gorontalo (JTPG)*, 7.